



e-ISSN: 2654-8488

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

<https://aksioma.unram.ac.id>
Vol. 25 No. 1, Juni 2026



ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 01 PADA LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BOGOR

Muhammad Rian Syauri¹, Andy Lasmana², Indra Cahya Kusuma³,

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia,
muhammadriansyr@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia,
andy.lasmana@unida.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia,
indra.cahya.k@unida.ac.id

Riwayat Artikel:

Received: 22 Juni 2026

Revised: -

Accepted: 27 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Corresponding Author:

Nama: Muhammad Rian Syauri

Email: muhammadriansyr@gmail.com

DOI: 10.29303/aksioma.v25i1.596

© 2026 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract. *Transparent and accountable management of state finances is a mandate of bureaucratic reform regulated under Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP). This study aims to analyse the conformity and compliance of the presentation of the Financial Statements of the General Elections Commission (KPU) of Bogor City with the provisions of Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 01. KPU of Bogor City faces complex challenges in managing double budgets sourced from the national budget (APBN) for Simultaneous Elections and regional grants (APBD) from the Bogor City Government for Local Elections, which escalates the risk of presentation non-conformity. The research design employs a descriptive quantitative approach by examining the entity's annual financial statement data as a time series over five fiscal years, specifically the 2020–2024 period. The results indicate that the conformity level of the financial statement presentation of KPU Bogor City with PSAP No. 01 is 60%, while the non-conformity level is 40%. The financial statement components that conform to PSAP No. 01 include the Operational Report (LO), Statement of Changes in Equity (LPE), and Notes to Financial Statements (CaLK). However, non-conformities were identified in the Budget Realization Report (LRA) and Balance Sheet presentation based on the indicators used in this study. Therefore, the financial statement presentation of KPU Bogor City can be categorized as moderately conforming to the provisions of PSAP No. 01, although improvements are still required in several components to enhance the overall level of conformity.*

Keywords: PSAP No. 01, Financial Statements, General Elections Commission (KPU) of Bogor City, Accountability, Descriptive Quantitative.

Abstrak: Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan tuntutan reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian dan kepatuhan penyajian Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor terhadap ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01. KPU Kota Bogor menghadapi kompleksitas pengelolaan anggaran ganda, yang berasal dari APBN untuk tahapan Pemilu Serentak dan dana hibah APBD dari Pemerintah Kota Bogor untuk Pilkada, sehingga meningkatkan risiko ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data laporan keuangan tahunan entitas secara *time series* dalam kurun waktu lima tahun anggaran, yaitu periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan KPU Kota Bogor Tahun 2020–2024 terhadap PSAP Nomor 01 sebesar 60%, sedangkan tingkat ketidaksesuaiannya sebesar 40%. Komponen laporan keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 01 meliputi Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu, masih ditemukan ketidaksesuaian pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan KPU Kota Bogor dapat dikategorikan cukup sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 01, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa komponen agar tingkat kesesuaiannya dapat ditingkatkan.

Kata kunci : PSAP No. 01, Laporan Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Akuntabilitas, Deskriptif Kuantitatif.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia mengharuskan adanya pengelolaan keuangan negara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai wujud akuntabilitas publik, setiap lembaga pemerintah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PSAP Nomor 01 secara khusus mengharuskan penyajian menyeluruh tujuh elemen laporan keuangan (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK) untuk menjamin kewajaran informasi bagi para pemangku kepentingan.

Dalam lanskap pemerintahan Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memegang peran sentral sebagai lembaga negara yang mengelola anggaran sangat besar, khususnya pada momentum Pemilu Serentak 2024. Sebagai entitas pelaporan tingkat pusat, KPU RI menghadapi tantangan akuntansi yang unik dibandingkan kementerian/lembaga lain. Tantangan tersebut terletak pada kewajiban mengonsolidasikan laporan keuangan dari ribuan satuan kerja (Satker) yang sudah

menyebarkan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Selain mengelola dana APBN yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah untuk pemilihan presiden dan legislatif, KPU RI juga harus memastikan akuntabilitas pengelolaan dana hibah (APBD) yang dikelola oleh KPU Daerah untuk pelaksanaan Pilkada. Kompleksitas sumber dana ganda ini meningkatkan risiko kesalahan penyajian dalam laporan keuangan konsolidasi jika tidak didukung oleh kepatuhan standar akuntansi yang ketat di setiap tingkatan satker.

Tekanan akuntabilitas yang dialami KPU RI tersebut mengalir secara vertikal hingga ke tingkat satuan kerja di daerah, termasuk KPU Kota Bogor. Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu di wilayahnya, KPU Kota Bogor tidak hanya bertugas menyukseskan tahapan teknis pemilihan, tetapi juga memikul beban administrasi keuangan yang berat. Pada periode 2023-2025, KPU Kota Bogor berada dalam fase krusial pengelolaan anggaran ganda, yaitu dana tahapan Pemilu dari APBN dan dana hibah Pilkada dari Pemerintah Kota Bogor.

Fenomena empiris yang menjadi perhatian utama adalah risiko terjadinya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan di KPU Kota Bogor di tengah tingginya intensitas transaksi selama tahapan pemilu. Permasalahan spesifik yang terindikasi berkaitan dengan penerapan PSAP No. 01 adalah pada kompleksitas pencatatan aset pemilu (antara persediaan dan aset tetap) serta pengungkapan sisa dana hibah yang dijelaskan pada bagian Catatan atas Laporan Keuangan yang menuntut akuntabilitas tinggi. Ketidakpatuhan dalam aspek ini berpotensi menyebabkan laporan keuangan tidak menyajikan informasi yang utuh dan wajar. Fenomena menarik yang melandasi penelitian ini adalah adanya lonjakan pengelolaan anggaran yang signifikan pada KPU Kota Bogor selama pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada 2024. Peningkatan volume transaksi dan pengelolaan dana hibah yang berisiko tinggi menimbulkan ketidakpatuhan dalam aspek penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan observasi awal, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya pada realisasi anggaran, melainkan pada bagaimana KPU Kota Bogor menyajikan ketujuh komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai mandat PSAP No. 01. Sering kali, perhatian organisasi selama masa yang padat hanya terpusat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan elemen akrual seperti Laporan Operasional (LO) dan rincian yang tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tidak mendapatkan perhatian yang sama dan laporan lainnya kurang mendapat perhatian mendalam, sehingga berpotensi mengurangi kualitas informasi bagi pengguna laporan.

Kutipan

Penelitian yang telah dilakukan oleh Komala, Kusuma, dan Didi (2024) dengan judul "Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07". Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengakuan pengukuran, penyampaian, serta pengungkapan mengenai aset tetap telah sejalan dengan ketentuan PSAP No. 07 dan telah diterapkan dengan efisien di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiningsih, Lasmana, dan Triwidatin (2023) dengan judul "Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor".

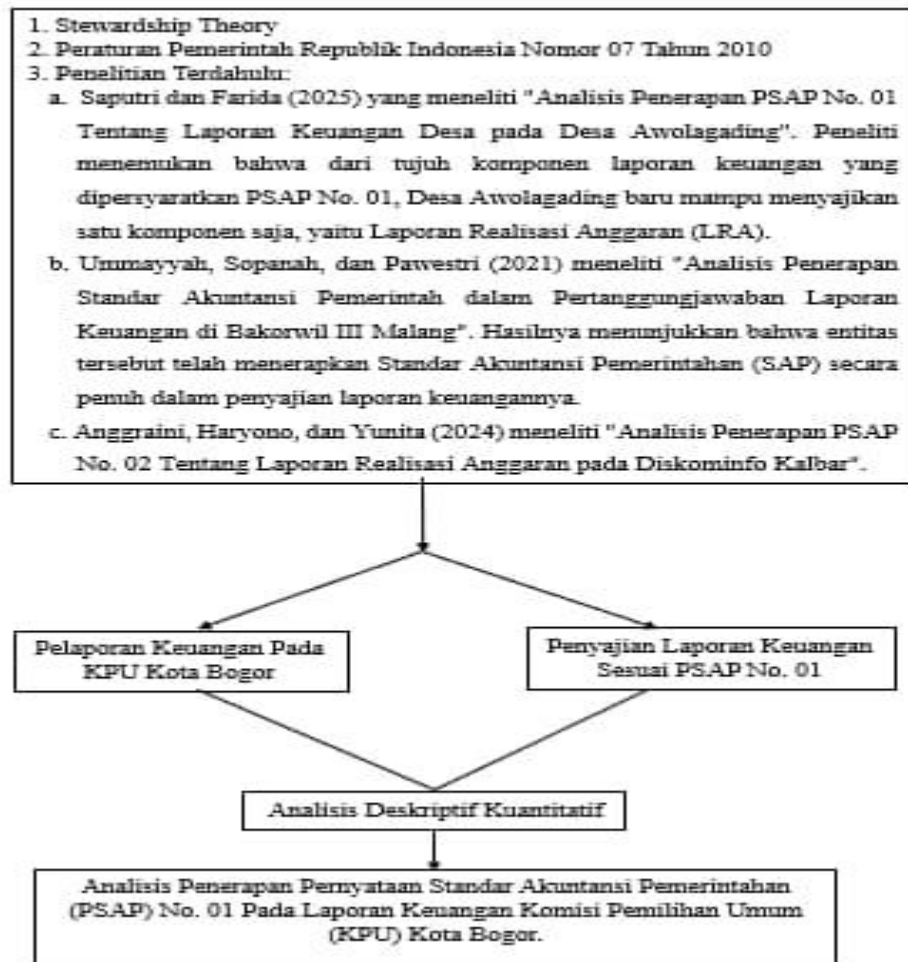
Tabel

Hasil kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdapat pada tabel perbandingan kesesuaian antara Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum untuk tahun 2020-2024 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan.

**Tabel 1. Hasil Penelitian Kesesuaian Laporan Keuangan
KPU Kota Bogor dengan PSAP 01.**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01	Laporan Keuangan KPU Kota Bogor	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Laporan Keuangan KPU Kota Bogor 2020		
Laporan Realisasi Anggaran		✓
Neraca		✓
Laporan Operasional	✓	
Laporan Perubahan Ekuitas	✓	
Catatan atas Laporan Keuangan	✓	
Laporan Keuangan KPU Kota Bogor 2021		
Laporan Realisasi Anggaran		✓
Neraca		✓
Laporan Operasional	✓	
Laporan Perubahan Ekuitas	✓	
Catatan atas Laporan Keuangan	✓	
Laporan Keuangan KPU Kota Bogor 2022		
Laporan Realisasi Anggaran		✓
Neraca		✓
Laporan Operasional	✓	
Laporan Perubahan Ekuitas	✓	
Catatan atas Laporan Keuangan	✓	
Laporan Keuangan KPU Kota Bogor 2023		
Laporan Realisasi Anggaran		✓
Neraca		✓
Laporan Operasional	✓	
Laporan Perubahan Ekuitas	✓	
Catatan atas Laporan Keuangan	✓	
Laporan Keuangan KPU Kota Bogor 2024		
Laporan Realisasi Anggaran		✓
Neraca		✓
Laporan Operasional	✓	
Laporan Perubahan Ekuitas	✓	
Catatan atas Laporan Keuangan	✓	
TOTAL	60%	40%

Gambar



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2026

METODE

Sugiyono (2017: 335) menyatakan bahwa analisis data adalah cara untuk mencari dan mengatur data yang sudah diperoleh dari analisis, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, merincinya hingga bagian terkecil, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih yang penting dan bisa dipelajari, serta menarik kesimpulan agar bisa dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada studi ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan saat ini. Di dalamnya terdapat usaha untuk menjelaskan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang ada saat ini.

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Membandingkan laporan keuangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor dengan penyajian PSAP 01 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selama lima tahun.
- b. Menyusun laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor sesuai dengan PSAP 01 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- c. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor dengan PSAP 01 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

- d. Menarik kesimpulan serta memberikan saran berdasarkan hasil analisis dan perbandingan penerapan PSAP 01 dengan pelaksanaan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor.

Metode analisis penelitian ini menggunakan cara yang mendasarkan pada penelaahan komprehensif terhadap tujuh komponen Laporan Keuangan Pemerintah, yang berfungsi sebagai sumber data sekunder sekaligus instrumen utama dalam menggambarkan kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh KPU Kota Bogor dengan PSAP 01 sesuai buku panduan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi untuk Pemerintah (KSAP) pada tahun 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari studi yang telah dilakukan para peneliti adalah tabel yang membandingkan kesesuaian antara Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum untuk tahun 2020 sampai 2024 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan. Ada beberapa elemen utama yang harus ada dalam setiap laporan keuangan pemerintah sesuai dengan panduan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Hasil penelitian ini adalah bagian dari proses riset langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisa penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAP nomor 01 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dari tabel 1 di atas, tampak bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor belum sepenuhnya memenuhi standar, yaitu hanya 60% telah sesuai, sementara 40% masih belum sesuai dengan PSAP nomor 01. Hal ini karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah melaporkan keuangannya sesuai dengan pedoman dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen laporan keuangan yang disediakan oleh KPU Kota Bogor meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip akuntansi yang dipakai dalam laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor untuk tahun anggaran 2020 hingga 2024 mengikuti Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 yang telah ditinjau dan disesuaikan dengan regulasi tersebut. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2020 hingga 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan menerapkan semua kebijakan serta aturan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan studi dan pembahasan tentang "Evaluasi Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Dalam Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor" untuk tahun anggaran 2020 sampai 2024, bisa disimpulkan bahwa hasil analisis kecocokan penyajian laporan keuangan KPU Kota Bogor dari Tahun 2020 hingga 2024 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 60% dan tingkat ketidaksesuaian sebesar 40%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan KPU Kota Bogor telah mengacu pada ketentuan PSAP Nomor 01, namun belum sepenuhnya memenuhi seluruh komponen dan unsur penyajian yang dipersyaratkan sehingga dapat dikategorikan cukup sesuai. Kedua, komponen laporan keuangan yang dianalisis menunjukkan bahwa KPU Kota Bogor telah menyampaikan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan untuk Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan PSAP Nomor 01. Akan tetapi, masih ada beberapa elemen dalam laporan keuangan yang tidak sesuai, terutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam

penyajian laporan keuangan agar tingkat kesesuaian terhadap PSAP Nomor 01 dapat ditingkatkan dan kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya berfokus pada analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan KPU Kota Bogor dengan PSAP Nomor 01 selama periode 2020–2024 melalui metode studi dokumentasi, sehingga penelitian belum mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, Objek studi ini hanya terfokus pada satu lembaga pemerintahan, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat diterapkan untuk semua KPU Kabupaten/Kota ataupun lembaga pemerintah lainnya. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar objek studi diperluas dengan membandingkan beberapa lembaga pemerintahan yang serupa, menggunakan periode penelitian yang lebih lama, serta menambah metode wawancara atau pengamatan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S. F, Lasmana. A, Triwidatin, Y. (2023). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bogor. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Vol. 2, No. 8, 2023: 1945-1956*
- Anggadini, S. D., Luckyardi, S., & Surtikanti, S. (2023). *Quality of Indonesia government financial statements. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 10(1), 44–55.
- Anggraini, F. R., Haryono, & Yunita, K. (2024). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang laporan realisasi anggaran. *Jurnal Ekobistek*, 13(3), 113–119.
- Ardyan, A., Kartini, T., & Indrawan, A. (2023). Analisis pengelolaan keuangan dan penerapan PSAP No. 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Puskesmas Ciracap. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10344–10355.
- Assa, J. R., Pangerapan, S., & Wokas, H. R. N. (2023). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 tentang akuntansi persediaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(2), 1547–1558.
- Fahira, A., & Indahwati, R. (2020). Analisis penerapan PSAP No. 12 tentang laporan operasional pada Inspektorat Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting*, 1(1), 1–8.
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Syafruddin, M. (2020). *Government accrual-based accounting standards implementation in Indonesia: The role of local government internal audit. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 28 (1), 105–117.
- Gamayuni, R. R. (2015). *The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on the effectiveness of the internal audit function and financial reporting quality implications at local government. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 8 (3), 212–221.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (Ed. 4). Salemba Empat.
- Harun, H., & Robinson, P. (2010). *The adoption of accrual accounting in the Indonesian public sector. Research in Accounting in Emerging Economies, 10, 233–250.*
- Harun, H., Van Peurse, K., & Eggleton, I. R. (2015). *Institutionalization of accrual accounting in the Indonesian public sector. Journal of Accounting & Organizational Change, 11(3), 313–335.*
- Kapantow, E. S., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(2), 494–505.*
- Komala, M. R., Kusuma, I. C., & Didi, (2024). Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) NO. 07. *Jurnal Akunida, 10(1), 59-67.*
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. (2024). *Beranda website resmi KPU Kota Bogor.* Diakses pada 8 Januari 2026, dari <https://kota-bogor.kpu.go.id/>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Buku standar akuntansi pemerintahan edisi 2021. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2025). Buku standar akuntansi pemerintahan edisi 2025. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Korompis, S., Tinangon, J. J., & Lambey, R. (2024). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 12(1), 922–931.*
- Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 167–174.*
- Purba, S., Nainggolan, A., & Br Tarigan, S. Y. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 20(2), 136–150.* <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i2.136>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.). John Wiley & Sons.*
- Soemarso, S. R. (2018). Akuntansi suatu pengantar. Salemba Empat.
- Sudaryo, Y., Syarif.D, dan Sofianti.N.A, 2017, **Keuangan di Era Otonomi Daerah**, Andi Offset. Hal : 56, 54. Yogyakarta
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D, Alfabeta. Hal: 53, 60, 137, 193, 203, 291, 329. Bandung. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.). John Wiley & Sons.*